

DOI: 10.59330/jmd.v2i2.49



JENIS ARTIKEL | HASIL PENELITIAN

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Nur Muhammad | Fitri Wahyuni*

AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

***KORESPONDENSI:**

fitri.wahyuni@umy.ac.id

HISTORI ARTIKEL**Diterima:**

17 September 2024

Direvisi:

15 Oktober 2024

Disetujui:

20 November 2024

Abstrak:

Latar Belakang: Meningkatnya penyaluran dana desa, menuntut pemerintah untuk dapat melakukan pengelolaan dana desa secara akuntabel dalam rangka memaksimalkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Tujuan: Penelitian ini menginvestigasi pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Pati.

Metode Penelitian: Penelitian ini melibatkan 120 responden yang merupakan perangkat desa / pemerintah desa berdasarkan *purposive sampling*. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan regresi linear berganda menggunakan SPSS v.2.2.

Hasil Penelitian: Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi. Namun demikian, aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Pati.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu dengan menggunakan konteks yang berbeda untuk memperkuat generalisasi hasil penelitian-penelitian terdahulu.

Kata kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa; Partisipasi Masyarakat; Sistem Pengendalian Internal; Aksesibilitas Laporan Keuangan; Komitmen Organisasi

SITASI: Muhammad, N., & Wahyuni, F. (2024). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 2(2), 59-72.

Pendahuluan

Desa adalah bagian resmi dari masyarakat dan dapat memperhatikan kebutuhan setiap orang di dalamnya berdasarkan tradisi dan leluhur yang diakui oleh sistem pemerintahan setempat. UU No. 6 Tahun 2014 menetapkan Desa sebagai entitas penting bagi pemerintah Indonesia dalam memajukan pembangunan nasional. Pembangunan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Kewenangan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kerentanan yang

berasal dari kesenjangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, karena desentralisasi menawarkan perspektif langsung melalui pemerintahan lokal dengan memberikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai potensi masyarakat yang dapat dikembangkan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk secara mandiri mengelola semua kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan sumber daya keuangannya. Sumber keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, yang mencerminkan otonomi desa dalam pengelolaan keuangan. Kemandirian desa dari transfer keuangan dari pemerintah daerah atau pusat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk disalurkan kepada masyarakat melalui penyaluran dana desa. Pada tahun 2018, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 60 triliun, dengan realisasi penyaluran dana ke desa-desa mencapai Rp 59,86 triliun, atau 98,77% dari jumlah yang direncanakan. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi Rp 70 triliun, dengan realisasi dana desa mencapai Rp 42,2 triliun, atau 60,29%, hingga Agustus 2019. Pada tahun 2020, jumlah tersebut naik lagi menjadi Rp 72 triliun. Dana desa dialokasikan untuk 434 pemerintah kabupaten dan kota di 33 provinsi, yang memberikan manfaat bagi 74.000 masyarakat. Dana desa, hibah, dana bagi hasil, dan sumber daya keuangan lainnya yang dialokasikan kepada masyarakat untuk tujuan pembangunan. Berdasarkan rata-rata dana desa yang dialokasikan ke setiap desa selama tiga tahun terakhir, terlihat adanya kecenderungan peningkatan.

Penyaluran dana desa bertujuan meningkatkan pemberdayaan, pembangunan, pelayanan, serta dukungan bagi masyarakat. Keberhasilan pengelolaannya bergantung pada penerapan tata kelola yang efektif, dengan menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan. Untuk mencapai hal ini, pemimpin pemerintah desa perlu memiliki kemampuan manajerial yang handal guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan efisien dan tepat sasaran. Selain itu, keberhasilan juga dipengaruhi oleh kepemimpinan yang visioner dan penerapan paradigma pembangunan alternatif yang mampu menjawab tantangan pertumbuhan daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong pengelolaan sumber daya keuangan secara mandiri.

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu, instansi, atau organisasi dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas dicirikan sebagai kewajiban untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang telah diberikan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Scott (2006) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya pemerintah memerlukan keterbukaan dalam menyebarkan informasi kepada publik tentang kegiatan yang dilakukan, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap tindakan pemerintah dan menumbuhkan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan (Jorge dkk., 2011). Dalam ranah pengelolaan dana desa, akuntabilitas dapat dicapai dengan pelibatan masyarakat, khususnya dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Keterlibatan ini berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat penegakan akuntabilitas dan mengurangi penyimpangan kebijakan, terutama dalam proses penganggaran (Taufik, 2009). Studi terdahulu mengindikasikan bahwa bahwa pelibatan masyarakat merupakan komponen penting yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sarah dkk., 2020).

Selain pelibatan masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal (SPI), aksesibilitas informasi keuangan, dan komitmen organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, SPI dicirikan sebagai tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan pada proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Studi yang dilakukan oleh Widyatama dkk. (2017) dan Rosyidi dkk. (2018) mengindikasikan bahwa SPI berdampak positif terhadap akuntabilitas dana desa, terutama dalam memitigasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan meningkatkan tata kelola (Sarah dkk., 2020).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan faktor penting dalam mencapai akuntabilitas. Aksesibilitas, sebagai prinsip tata kelola yang baik, mencakup inisiatif untuk menjamin bahwa data keuangan tersedia dan dapat dilihat oleh publik. Hal ini sejalan dengan perspektif bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat untuk mengakses dan menyebarkan pengetahuan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Pemerintah desa harus menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses dan murah bagi para pemangku kepentingan yang berkepentingan (Santi dkk., 2018).

Selain itu, komitmen organisasi sangat penting untuk administrasi dana desa yang efektif. Komitmen ini menandakan tujuan dan keyakinan organisasi untuk mencapai tata kelola yang baik (Fitriani dkk., 2021). Komitmen yang kuat mendorong peningkatan tanggung jawab publik, terutama untuk masalah keuangan (Mada dkk., 2007). Komitmen organisasi tidak hanya mencakup loyalitas tetapi juga keterlibatan anggota organisasi secara proaktif dalam memajukan tujuan organisasi. Allen dan Meyer (1990) mengidentifikasi tiga komponen utama komitmen: komitmen emosional, kontinuitas, dan normatif. Anggota organisasi dengan komitmen yang kuat terhadap organisasi akan bersikukuh untuk mendukung tujuan organisasi, tetap bertahan, dan meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai hasil yang diharapkan (Fitriani dkk., 2021).

Selain pelibatan masyarakat, SPI, dan aksesibilitas laporan keuangan, komitmen organisasi juga merupakan aspek penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi merupakan niat yang berasal dari keyakinan bahwa tatanan yang terstruktur dengan baik muncul dari komitmen tersebut (Edison dkk., 2016). Komitmen organisasi merupakan instrumen psikologis untuk melaksanakan operasi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana komitmen organisasi yang kuat dapat meningkatkan tanggung jawab publik, terutama dalam hal keuangan (Mada dkk., 2007). Komitmen organisasi tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk pengabdian kepada organisasi, tetapi juga mencakup peran aktif yang diambil oleh anggota organisasi untuk mendorong kemajuan organisasi. Menurut Allen dan Meyer (1990), elemen utama dari komitmen organisasi adalah "komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif." Seorang individu yang berdedikasi pada organisasi ditandai dengan prinsip-prinsip yang kuat, pengakuan terhadap tujuan organisasi, niat yang kuat untuk tetap berada di dalam organisasi, dan kesiapan untuk meningkatkan kinerja demi memenuhi tujuan organisasi (Sarah dkk., 2020).

Hasil penelitian beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa, dipengaruhi oleh beragam determinan namun dengan hasil yang inkonsisten. Faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat (Sarah dkk., 2020; Umaira & Adnan, 2019; Indraswari & Rahayu, 2021; Giriani dkk., 2021), SPI (Pratiwi & Dewi, 2021; Abarwati & Handayani, 2021; Pahlawan dkk., 2020; Sumadi & Muliati, 2022), aksesibilitas laporan keuangan (Puspa & Prasetyo, 2020; Meiliani & Sukarmanto, 2022; Indriasih dkk., 2022), dan komitmen organisasi (Sarah dkk., 2020; Mada dkk., 2017; Sumadi & Muliati, 2021; Giriani dkk., 2021). Untuk menutupi inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilaksanakan oleh Puspa dan Prasetyo (2020) dengan menggunkan pemerintah Desa di Kecamatan Pucakwangi dan Kecamatan Winong. Pemilihan sampel didasarkan pada fenomena terjadinya keterlambatan penyaluran dana desa yang berdampak pada realisasi anggaran di Kabupaten Pati.

Teori Stewardship

Stewardship theory memperkenalkan sebagai teori yang didasarkan pada perilaku organisasi, perilaku manusia, model manusia, dan mekanisme psikologi (Identitas, motivasi dan kekuasaan), mempraktikkan kepemimpinan sebagai suatu aspek dengan menunjukkan peran pentingnya dalam mencapai tujuan. *Stewardship (a service attitude)* adalah perspektif baru tentang bagaimana mengelola dan mengoperasikan organisasi, mengubah konsep pimpinan & manajemen yang terdapat dari konsep kontrol dan komando ke konsep pengawasan, kemitraan dan manajemen. kepemilikan anggota/tim.

Donaldson dan Davis (1991) mengatakan bahwa, Teori *Stewardship* teori menjelaskan manajer tidak termotivasi oleh tujuan pribadi, tetapi lebih terfokus pada sudut pandang utama kepentingan organisasi. Oleh karena itu, teori tersebut memiliki landasan psikologis dan sosiologis, dimana manajer sebagai steward memiliki motivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan utamanya, namun *stewardship* tidak akan meninggalkan organisasi karena ingin mencapai tujuan organisasi. Menurut teori ini, dimaksudkan bagi peneliti untuk mempelajari situasi dimana para pemimpin perusahaan atau organisasi sebagai pelayan agar termotivasi untuk bertindak sesuai dengan prinsip agar menjadi lebih baik.

Teori manajemen mengharapkan individu dalam perusahaan atau organisasi untuk mendukung tujuan organisasi lebih dari tujuan pribadi. Teori ini sejalan dengan kenyataan bahwa instansi pemerintah tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi cenderung melayani masyarakat sebagai prinsipalnya. Hingga saat ini, wajar jika instansi memberi pelayanan yang baik karena telah memperoleh sumber daya untuk melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan daerah setempat. Perlu juga meningkatkan fungsi pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

Makna teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu menjelaskan kondisi pemerintah desa sebagai organisasi yang dapat dipercayai, serta dapat bertindak untuk kepentingan umum secara adil untuk kesejahteraan masyarakat setempat dengan memenuhi tugas dan fungsinya secara efektif. Tanggung jawab yang jelas, setara dengan karakteristik laporan keuangan (handal, relevan, sebanding, dan mudah dipahami).

Teori *stewardship* menjelaskan keberadaan kepala desa dan Pelaksanaan Teknik Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala pengelolaan keuangan desa yang bertindak dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat untuk kepentingan publik serta kesejahteraan masyarakat setempat. Motivasi perorangan untuk melakukan tindakan dalam suatu organisasi atau perusahaan dimana teori dapat memberi pelayanan yang baik pada prinsipalnya. Penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam teori ini dapat berdampak baik pada tata kelola yang berfungsi dengan baik (Nurkhasah, 2019).

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam setiap keputusan yang di ambil pemerintah desa, masyarakat berhak terlibat untuk mengawasi berlangsungnya program-program desa agar tidak terjadi kecurangan dan pemerintah desa diwajibkan melakukan transparansi lebih terbuka dalam segala hal pengelolaan dan penggunaan dana desa (Mada dkk., 2017) . Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Umaira dan Adnan (2019) di mana partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam mengambil kebijakan (Taufik, 2009). Penelitian terdahulu mengindikasikan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sarah dkk., 2020). Dalam teori *stewardship* masyarakat berhak mengetahui bagaimana berjalannya pemerintahan desa apakah sudah sesuai. Dengan adanya keterbukaan atau transparansi dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatannya, masyarakat bisa menilai apakah pemerintah desa sudah menjalankan kewajibannya dengan baik kepada masyarakat. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh SPI Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa SPI Pemerintah atau disingkat SPIP adalah SPI yang dilaksanakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintahan pusat dan daerah. Oleh karena itu, SPI di dalam pengelolaan dana desa begitu penting untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan atau kecurangan dalam pemberlakuan pengelolaan dana desa. Menurut Mulyadi (2017:129) SPI merupakan struktur organisasi atau metode dan ukuran yang dikoordinasikan dalam menjaga suatu aset organisasi, melakukan pengecekan dengan ketelitian, kekuatan data, mendorong keefisienan dan mendorong adanya kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan adanya teori *stewardship* dimana SPI merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau memastikan sebuah organisasi dalam menjalankan tujuannya dan tidak menyalahi aturan yang ada. Sehingga diharapkan bahwa pemerintah desa yang berada di kabupaten Pati dapat menjalankan tujuannya dengan sesuai peraturan yang ada tidak menyalahi atau melakukan penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

SPI merupakan bagian dari pendekatan atau rencana organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien dengan menggunakan akuntabilitas keuangan sebagai pedoman serta memerlukan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada (Aramide & Bashir, 2015). Dari penelitian Sarah dkk. (2020) dan Widyatama dkk., (2017), mengatakan SPI berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada publik sehingga mereka dapat menilai akuntabilitas keuangan. Masyarakat memiliki hak dasar yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas masalah yang sedang terjadi yang sehingga menimbulkan perdebatan pada publik. Akuntabilitas yang efektif ditunjukkan oleh akses publik ke akun dan laporan yang mudah dibaca dan dapat dimengerti. Akses dapat berupa media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan website yang dapat disampaikannya akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Mulyana, 2006).

Pemerintah desa perlu menyadari tanggung jawabnya untuk mengelola dana desa agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat desa. Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki akses terhadap informasi tentang bagaimana dana desa digunakan. Kemudahan akses kepada legislator dan diprakarsai oleh APBN untuk menarik perhatian masyarakat luas dalam mengelola akuntabilitas. Laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah desa akan mempunyai makna jika mudah diakses oleh pemangku kepentingan sehingga tujuan pengalokasian dana desa untuk membangun pembangunan desa dan kemakmuran dalam menyejahterakan masyarakat desa dengan maksimal.

Kemudahan akses ke laporan keuangan memberikan kemampuan untuk mengontrol penggunaan dana publik oleh otoritas akuntansi, publik dan investor. Adanya teori *stewardship* di dalam penelitian ini diharapkan aksesibilitas laporan keuangan dapat menjamin berjalannya akuntabilitas pengelolaan dana desa itu sendiri dan memberikan informasi terpercaya kepada masyarakat sehingga masyarakat akan puas dengan adanya laporan tersebut.

Dengan diterapkannya pengendalian oleh berbagai pihak, diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tercapai lebih besar dari sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aksesibilitas adalah salah satu faktor yang dapat menjamin keberlanjutan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan dana desa. Dalam mengkaji dampak penyajian neraca daerah dan aksesibilitas pelaporan

keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil survei menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mulyana, 2006) dan didukung oleh Nasution (2009) dari penelitiannya bahwa aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

H₃: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Organisasi berupaya untuk melayani masyarakat secara efisien; namun, keberhasilan pelayanan ini sangat bergantung pada fungsi perangkat yang terlibat. Komitmen organisasi merupakan faktor penting yang terkait dengan perilaku, kinerja, dan produktivitas anggota organisasi. Aparatur dan organisasi merupakan dua elemen yang saling bergantung yang penting untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, karena aparatur secara langsung bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan organisasi (Nurdin & Wijaya, 2019).

Dalam ranah pengelolaan anggaran dana desa, aparatur harus secara cermat mempertanggungjawabkan penggunaan uang untuk memberikan transparansi dan pengawasan keuangan daerah. Menurut teori *stewardship*, aparatur pengelola dana desa diharapkan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya secara efisien. Komitmen yang kuat menjamin penyediaan layanan publik yang optimal dan akuntabel. Aparatur berfungsi sebagai penggerak organisasi, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua operasi pengelolaan anggaran mematuhi gagasan akuntabilitas, yang merupakan dasar bagi keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian dari Nurkhasah (2019) menunjukkan adanya pengaruh positif komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya komitmen organisasi tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan. Dengan kecepatan dan ketepatan bekerja akan memengaruhi laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian terdahulu juga menemukan adanya pengaruh antara komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sarah dkk., 2020; Rismawati, 2019) sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai desa yang ada di Kecamatan Pucakwangi dan Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Sebanyak 120 responden terlibat, dengan tingkat pengembalian kuesioner 100% dan informasi demografi responden sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden didominasi oleh mereka yang berumur lebih dari 40 tahun (59%), dengan tingkat pendidikan terakhir SMA (69%), dan lama bekerja lebih dari 10 tahun (62%). Selanjutnya

berdasarkan jenis kelamin responden, jumlah laki-laki dan perempuan relatif sama, termasuk berdasarkan jabatan responden.

Tabel 1 Demografi Responden

Deskripsi	Jumlah	%
<i>Umur</i>		
< 20 tahun	0	0
21-30 tahun	9	8
31-40 tahun	40	33
> 40 tahun	71	59
<i>Jenis Kelamin</i>		
Laki-laki	63	53
Perempuan	57	47
<i>Tingkat Pendidikan Terakhir</i>		
SMA	83	69%
Diploma 3	5	4%
S1	32	27%
<i>Lama Bekerja</i>		
<1 tahun	1	1%
1-5 tahun	13	11%
6-10 tahun	29	24%
>10 tahun	77	62%
<i>Jabatan Responden</i>		
Kepala Desa	40	33,3%
Sekretaris	40	33,3%
Bendahara	40	33,3%

Penelitian ini menggunakan variabel partisipasi masyarakat, SPI, aksesibilitas laporan keuangan, komitmen organisasi sebagai variabel independen, dan akuntabilitas keuangan dana desa sebagai variabel dependennya dengan definisi operasional variabel masing-masing dipresentasikan dalam Tabel 2. Masing-masing variabel diperoleh menggunakan kuesioner berskala likert 1 sampai 5, di mana nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Selanjutnya, data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan regresi linear berganda menggunakan SPSS.

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Akuntabilitas Dana Desa	Pemberian pelaporan dan pengungkapan dalam kegiatan dan kinerja dilakukan oleh pemerintah dalam kurung waktu pada pihak yang bersangkutan.	Kecakupan informasi
		Kejujuran dan kebutuhan informasi
		Ketepatan penyajian laporan
		Kesesuaian prosedur
		Kepatuhan dalam pelaporan
Partisipasi Masyarakat	Keputusan yang akan diambil oleh pemerintah desa haruslah melibatkan masyarakat.	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa.
		Mengusulkan rencana anggaran
		Terlibat dalam rapat paripurna.
		Terlibat mengawasi dan melaporkan
		Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran.

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel (lanjutan)

SPI		Tindakan dan kegiatan pegawai maupun pemimpin dalam menjalankan kegiatan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan	Memberikan penghargaan
			Kejujuran dan keterbukaan informasi
			Kepatuhan dalam pelaporan
			Kesesuaian prosedur
			Kecukupan informasi
Aksesibilitas Laporan Keuangan	Laporan	Pelaporan keuangan yang dapat dikonsumsi oleh publik	Ketepatan penyampaian laporan
			Keterbukaan
			Kemudahan
Komitmen Organisasi		Menunjang keberhasilan organisasi untuk tujuan dengan mengutamakan kepentingannya dalam organisasi	Dapat diakses dengan mudah
			Perasaan mempunyai organisasi
			Keyakinan tujuan
			Mempertahankan anggota organisasi
			Kesetiaan dalam organisasi
			Kesediaan mengarahkan dalam upaya nama organisasi

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 25, nilai mean atau rata-rata sebesar 22,66 dan nilai standar deviasi sebesar 2,532 yang mengindikasikan data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Pada variabel SPI nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 35, nilai mean atau rata-rata sebesar 32,68 dan nilai standar deviasi sebesar 2,735 menunjukkan data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

Selanjutnya, variabel aksesibilitas laporan keuangan nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 25, nilai mean atau nilai rata-rata sebesar 22,29 dan nilai standar deviasi sebesar 2,371 menunjukkan data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Pada variabel komitmen organisasi nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 25, nilai mean atau nilai rata-rata 23,18 dan nilai standar deviasi sebesar 3,458 menunjukkan data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 30, nilai mean atau nilai rata-rata sebesar 27,72 dan nilai standar deviasi sebesar 2,485 menunjukkan data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Std. Deviation
		Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	
Partisipasi Masyarakat	120	5	25	15	8	25	22,66	2,532
SPI	120	7	35	21	14	35	32,68	2,735
Aksesibilitas Laporan Keuangan	120	5	25	15	11	25	22,29	2,371
Komitmen Organisasi	120	6	30	18	11	25	23,18	3,485
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	120	6	30	18	8	30	27,72	2,485

Uji Validitas dan Reliabilitas

Suatu Kuisisioner dapat dikatakan valid apabila item yang digunakan dapat menunjukkan suatu hasil yang diukur menggunakan kuisisioner tersebut. Tingkat nilai signifikansi $< 0,05$ maka pernyataan tersebut valid. Berdasarkan Tabel 3, seluruh item kuisisioner dapat disimpulkan valid.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r_{hitung}	Sig.
Akuntabilitas Pengolaan Dana Desa	Y.1	0,729	0,000
	Y.2	0,682	0,000
	Y.3	0,679	0,000
	Y.4	0,848	0,000
	Y.5	0,232	0,011
	Y.6	0,789	0,000
Partisipasi Masyarakat	X1.1	0,744	0,000
	X1.2	0,627	0,000
	X1.3	0,854	0,000
	X1.4	0,862	0,000
	X1.5	0,230	0,011
Sistem Pengendalian Internal	X2.1	0,746	0,000
	X2.2	0,800	0,000
	X2.3	0,720	0,000
	X2.4	0,236	0,000
	X2.5	0,842	0,009
	X2.6	0,775	0,000
	X2.7	0,830	0,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	X3.1	0,829	0,000
	X3.2	0,855	0,000
	X3.3	0,838	0,000
	X3.4	0,258	0,004
	X3.5	0,591	0,000
Komitmen Organisasi	X4.1	0,844	0,000
	X4.2	0,808	0,000
	X4.3	0,730	0,000
	X4.4	0,725	0,000
	X4.5	0,856	0,000

Uji realibilitas bertujuan untuk menguji kemampuan item pernyataan diwaktu yang berbeda namun menghasilkan pengukuran yang sama. Kuisisioner dapat dikatakan handal atau reliabel ketika jawaban atas pertanyaan terlihat stabil dilihat dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,753, SPI sebesar 0,820, aksesibilitas laporan keuangan 0,755, komitmen organisasi sebesar 0,897, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,782, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam pernyataan dinyatakan reliabel.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Partisipasi Masyarakat	0,753
SPI	0,820
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,755
Komitmen Organisasi	0,897
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,782

Uji Hipotesis

Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh H_1 , H_2 , dan H_4 terdukung karena nilai koefisien beta yang searah dengan hipotesis dan nilai sig. kurang dari 0,10. Artinya, partisipasi masyarakat, SPI, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, Tabel 5 juga menunjukkan bahwa H_3 tidak terdukung karena memiliki nilai sig. 0,385 dan nilai beta negative sehingga, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, nilai koefisien determinasi menunjukkan angka 0,459 yang artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 45,9%.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi

Variabel	Standardized Coefficients Beta	T	Sig
Constant		5,406	0,000
Partisipasi Masyarakat	0,205	1,891	0,061
SPI	0,219	2,030	0,045
Aksesibilitas Laporan Keuangan	-0,096	-0,871	0,385
Komitmen Organisasi	0,434	4,190	0,000

Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Umaira dan Adnan (2019). Dalam hal ini menyatakan bahwa hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adanya tindakan yang telah sesuai dalam mencapai tujuan organisasi dan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam mengambil kebijakan (Taufik, 2009). Selain itu beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa menemukan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sarah dkk., 2020).

Dalam teori *stewardship* hubungan antara pegawai desa dengan masyarakat sudah sangat optimal, dengan hal ini keinginan dari masyarakat dalam mengetahui berjalannya pemerintahan desa apakah sudah sesuai dengan pelaporan yang telah dilaporkan kepada masyarakat. Dengan adanya keterbukaan atau transparan antara pegawai pemerintah desa kepada masyarakat dalam mempertanggungjawabkan segala suatu kegiatannya.

Optimalnya partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa membantu pemerintahan desa untuk menyusun laporan desa bahwa apa yang sudah dijalankan dalam melakukan keterbukaan kepada masyarakat. Karena itu komunikasi antara pegawai desa dengan masyarakat yang sudah interaktif, dalam pengetahuan dan waktu yang dimiliki oleh masyarakat terkait dalam pengambilan keputusan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa, dan sudah adanya pengawasan masyarakat atas penggunaan dana desa sehingga bisa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang bisa disampaikan melalui spanduk yang ditempatkan di depan kantor desa, website desa dan bisa juga disampaikan secara langsung di hadapan masyarakat.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa SPI memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Aspek-aspek SPI yang meliputi lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, dan penilaian risiko, meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara bijaksana (Pertwi, 2016). Kesimpulan ini

sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa SPI meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Widyatama dkk., 2017; Abarwati & Handayani, 2021; Puspa, & Prasetyo, 2020).

Berdasarkan kajian teoretisi, SPI sejalan dengan teori *stewardship*, yaitu pengelolaan yang berkelanjutan oleh pimpinan dan staf bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi agar mencapai pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan. SPI mencakup strategi dan metodologi yang ditujukan pada pemeliharaan aset, penyampaian informasi yang tepat dan bertanggung jawab, peningkatan efisiensi operasional, dan fasilitasi pelaksanaan tujuan manajemen sebaik mungkin.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan, tidak memberikan pengaruh positif dan substansial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi keuangan tidak serta merta meningkatkan akuntabilitas (Puspa & Prasetyo, 2020). Widyatama dkk. (2017) berpendapat bahwa laporan keuangan pemerintah sangat penting untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial, evaluasi kinerja keuangan, serta penilaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana, yang berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disebarluaskan melalui saluran yang mudah diakses oleh masyarakat.

Secara teoritis, hak masyarakat atas informasi keuangan bersumber dari asas akuntabilitas publik yang mengamanatkan lembaga pemerintah untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bukti keterbukaan dan tanggung jawab. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan informasi keuangan saat ini belum memadai untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketergantungan media pada metode pelaporan yang sederhana, seperti papan reklame, yang terbatas dalam menyampaikan informasi yang komprehensif. Akibatnya, catatan keuangan tidak memadai bagi masyarakat untuk menilai tanggung jawab pengelolaan dana desa.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin tinggi pula pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurkhasah (2019), Sarah dkk. (2020), Rismawati (2019), dan Nurdin dan Wijaya (2019) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan dan dorongan dari dalam organisasi, termasuk penghargaan atau penghargaan, untuk meningkatkan dedikasi dan kepedulian terhadap tujuan organisasi.

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa untuk pelayanan publik harus bersifat terbuka, dapat dipercaya, dan terekam dengan baik. Akuntabilitas ini merupakan wujud tanggung jawab utama dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori *stewardship*, para pengelola dana desa harus memiliki dedikasi yang kuat terhadap organisasi agar dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Tugas organisasi mencakup memastikan akuntabilitas menyeluruh untuk semua tindakan penganggaran, tugas yang dibebankan kepada staf sebagai penggerak utama organisasi. Prinsip komitmen menggarisbawahi bahwa upaya ini harus memprioritaskan tujuan organisasi.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat, SPI, aksesibilitas informasi keuangan, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, SPI, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun aksesibilitas laporan keuangan tidak memiliki dampak yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat SPI, dan menumbuhkan komitmen organisasi merupakan komponen penting untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Terbatasnya laporan keuangan yang dapat diakses menandakan perlunya meningkatkan keterbukaan dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian, penelitian ini terdapat beberapa ruang untuk dikembangkan lebih lanjut. Pendekatan survei yang digunakan tidak dilengkapi dengan wawancara, sehingga mengakibatkan kekurangan dalam memahami pendapat responden. Kedua, penggunaan kuesioner dari penelitian sebelumnya tanpa penyesuaian kontekstual dapat mengurangi keakuratan data. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada dua kecamatan di Kabupaten Pati dengan jumlah sampel yang sangat kecil, sehingga temuan-temuannya tidak dapat diekstrapolasikan ke pemerintahan desa lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan metodologi wawancara untuk mendapatkan data yang lebih bernuansa, memperluas cakupan penelitian untuk meningkatkan generalisasi temuan, dan memeriksa aspek-aspek terkait lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas administrasi dana desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi penelitian di masa mendatang terhadap literatur dan praktik administrasi dana desa.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, L., & Handayani, U. N. N. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kelurahan Margokaton Kabupaten Sleman Yogyakarta).
- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of occupational psychology*, 63(1), 1-18.
- Aramide, S. F., & Bashir, M. M. (2015). The effectiveness of internal control system and financial accountability at local government level in Nigeria. *International Journal of Research in Business Management*, 3(8), 1-6.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
<https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fitriani, Y., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2021, December). Antecedent Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang). In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 331-346).
- Giriani, M., Dahtiah, N., & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 480-492.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1-15.
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 972-981.
- Jorge, S. S. P. M., Sa, P. M., Pattaro, A. F., & Lourenço, R. P. (2011, June). Local government financial transparency in Portugal and Italy: A comparative exploratory study on its determinants. In *13th Biennial CIGAR conference, bridging public sector and non-profit sector accounting* (pp. 9-10).

- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Meilani, N., & Sukarmanto, E. (2022). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Bandung Conference Series: Accountancy,* 2(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.637>
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyana, B. (2006). *Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Nasution, S. I. (2009). *Pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal,* 1(1).
- Nurkhasah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). *Skripsi,* UIN Walisongo Semarang, 53(9), 1689–1699.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal,* 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pertiwi, D. (2016). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi.*
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics,* 1(2), 183–198. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.69>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi,* 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa* (Doctoral dissertation, Skripsi, universitas muhammadiyah magelang).
- Rosyidi, M., Azlina, N., & Putra, A. A. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia,* 1(1), 1-14.
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi,* 4(4), 330-342.
- Santi, Y. W., Utary, A. R., & Kurniawan, I. S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, Vol. 3* (2), 281-297.
- Sumadi, N. K., & Muliati, N. K. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Petang. *Hita Akuntansi dan Keuangan,* 3(2), 25-35.
- Scott, J. K. (2006). "E" the people: Do US municipal government web sites support public involvement?. *Public administration review,* 66(3), 341-353.
- Taufik, T. (2009). Pengelolaan keuangan desa dalam sistem keuangan negara republik indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau,* 17(01), 8754.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi,* 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal

terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1-20.